

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022
UAPPA-W DI YOGYAKARTA

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta

DI. Yogyakarta - DI Yogyakarta

Telp. 0274-552997 Fax. 0274-552998

e-mail : admin@pa-yogyakarta.net



LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTASI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
WILAYAH DI YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta

Telp. 0274-552997 Fax. 0274-552998

DI. Yogyakarta - DI Yogyakarta

e-mail : admin@pa-yogyakarta.net

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

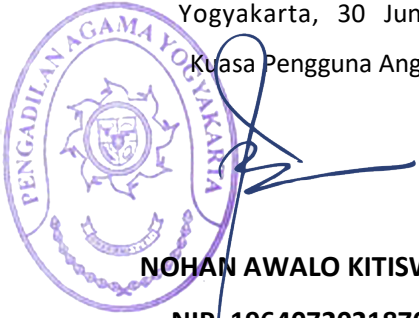
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta mencakup pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 30 Juni 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



NOHAN AWALO KITISWORO, S.H
NIP. 196407202187032002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Yogyakarta	14
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran.....	24
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	23
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	23
B.2. Belanja Negara	24
B.3. Belanja Barang	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar.....	27
C.2. Aset Tetap	30
C.3. Kewajiban	32
C.4. Ekuitas.....	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	34
D.2. Beban Pegawai.....	34
D.3. Beban Persediaan	34
D.4. Beban Barang dan Jasa	35
D.5. Beban Pemeliharaan	35

D.6.	Beban Perjalanan Dinas	36
D.7.	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	37
D.9.	Beban Penyusutan Amortisasi	37
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	37
D.11.	Beban Lain-Lain	37
D.12.	Kegiatan Non Operasional	37
D.13.	Pos Luar Biasa	37
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	38
E.1.	Ekuitas Awal	38
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	38
E.3.	Penyesuaian Nilai Aset.....	38
E.4.	Koreksi Nilai Persediaan.....	38
E.5.	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	38
E.6.	Aset Tetap Non Revaluasi	38
E.7.	Koreksi Lain-lain	38
E.8.	Transaksi Antar Entitas	39
E.9.	Ekuitas Akhir	40
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	40
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	40
F.2.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	40
F.3.	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua.....	40
F.4.	Rekening Pemerintah.....	41
F.5.	Revisi DIPA.....	41
F.6.	Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB	42
F.7.	Pengungkapan Lain-lain	42
	Laporan-laporan Pendukung.....	42

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Yogyakarta

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta DI. Yogyakarta - DI Yogyakarta

Telp. 0274-552997 Fax. 0274-552998 e-mail : admin@pa-yogyakarta.net

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 30 Juni 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,



NOHAN AWALO KITISWORD, S.H.

NIP. 196407202187032002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan UAPPA-W Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 373.045.500 atau mencapai 43,03 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 866.852.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 390.151.515 atau mencapai 48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 809.353.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	866.852.000	373.045.500	43,03	399.690.800
Belanja Negara	809.353.000	390.151.515	48,21	206.831.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2022 dan 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 50.092.621, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 50.092.621; Aset Tetap (bersih) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 52.478.500, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 52.478.500 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0. Dan nilai ekuitas disajikan sebesar Rp. (2.385.879).

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan Des 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	50.092.621	25.683.374	24.409.247	95,04
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	50.092.621	25.683.374	24.409.247	95,04
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	52.478.500	0	52.478.500	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	52.478.500	0	52.478.500	0,00
Ekuitas				
Ekuitas	(2.385.879)	25.683.374	(28.069.253)	(109,29)
Jumlah Ekuitas	(2.385.879)	25.683.374	(28.069.253)	(109,29)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	50.092.621	25.683.374	24.409.247	95,04

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 377.920.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 423.095.768, sehingga terdapat surplus/defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 45.175.268). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus/defisit sebesar Rp. 0 dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami surplus/defisit - LO sebesar (Rp. 45.175.268).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 25.683.374 dikurangi (defisit) - LO sebesar Rp. 45.175.268 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 17.106.015, sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai (Rp.2.385.879)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	866.852.000	373.045.500	43,03	399.690.800
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		866.852.000	373.045.500	43,03	399.690.800
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	809.353.000	390.151.515	48,21	206.831.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		809.353.000	390.151.515	48,21	206.831.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NERACA

PER 30 Juni 2022 DAN 2021

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	24.560.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1. 2.	4.875.000	0
Persediaan	C.1. 3.	19.382.621	25.682.374
Persediaan yang Belum Diregister	C.1. 4.	1.275.000	0
Jumlah Aset Lancar		50.092.621	25.683.374
Jumlah Aset		50.092.621	25.683.374
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5 1.	9.660.000	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5 2.	18.258.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	24.560.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		52.478.500	0
Jumlah Kewajiban		52.478.500	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	(2.385.879)	25.683.374
Jumlah Ekuitas		(2.385.879)	25.683.374
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		50.092.621	25.683.374

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	377.920.500	399.690.800
Jumlah Pendapatan		377.920.500	399.690.800
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	15.735.753	5.584.150
Beban Barang dan Jasa	D. 4	195.200.165	160.951.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	212.159.850	45.880.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		423.095.758	212.415.150
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(45.175.268)	187.275.650
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(45.175.268)	187.275.650

Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(45.175.268)	187.275.650

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	2021
Ekuitas Awal	E. 1	25.683.374	23.864.131
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(45.175.268)	187.275.650
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah / mengurangi Ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 5	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 6	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 7	0	0
Lain-lain	E. 8	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 9	17.106.015	(192.859.800)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 10	(28.069.253)	(5.584.150)
Ekuitas Akhir		(2.385.879)	18.279.981

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Yogyakarta

Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya.

Misi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional;
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel;
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi
2. Peningkatan penyelesaian perkara
3. Peningkatan penyelesaian perkara prodeo bagi masyarakat miskin / terpinggirkan
4. Peningkatan tertib administrasi perkara
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Peningkatan kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Badan Peradilan Agama Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Pengadilan Agama Yogyakarta.

Jumlah satuan kerja di lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta adalah satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Eselon	Uraian Satker	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	BM	M	BM	M	BM	
1	04	Pengadilan Agama Yogyakarta			V						
2	04	Pengadilan Agama Sleman			V						
3	04	Pengadilan Agama Wates			V						
4	04	Pengadilan Agama Bantul			V						
5	04	Pengadilan Agama Wonosari			V						
6	04	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta			V						
Jumlah											

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

BM = Belum menyampaikan LK

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan

Agama Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Negara yang berhubungan dengan tupoksi Peradilan diakui setelah jasa telah selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau bagian lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementrian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2022 dan 2022. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
373.045.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 373.045.500 atau mencapai 43,03 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 866.852.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh lingkup Koordinator Wilayah 005.04 Yogyakarta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel di bawah :

Tabel 4 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	26.890.000
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	123.300.000
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	222.855.500
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0
6.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0
Total Pendapatan		373.045.500

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 26.645.300 atau 6,67 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan menurunnya perkara masuk di Pengadilan Agama se Wilayah Yogyakarta.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	26.890.000	27.080.000	(190.000)	(0,70)

3. Pendapatan Ongkos Perkara	123.300.000	128.475.000	(5.175.000)	(4,03)
4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	222.855.500	244.135.800	(21.280.300)	(8,72)
5. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0
6. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Total Pendapatan	373.045.500	399.690.800	(26.645.300)	(6,67)
Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0	0
Total Pendapatan Bersih	373.045.500	399.690.800	(26.645.300)	(6,67)

B.2. Belanja Negara

Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
390.151.515

Realisasi Belanja Negara pada lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp. 390.151.515 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 48,21 persen dari anggaran senilai Rp. 809.353.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

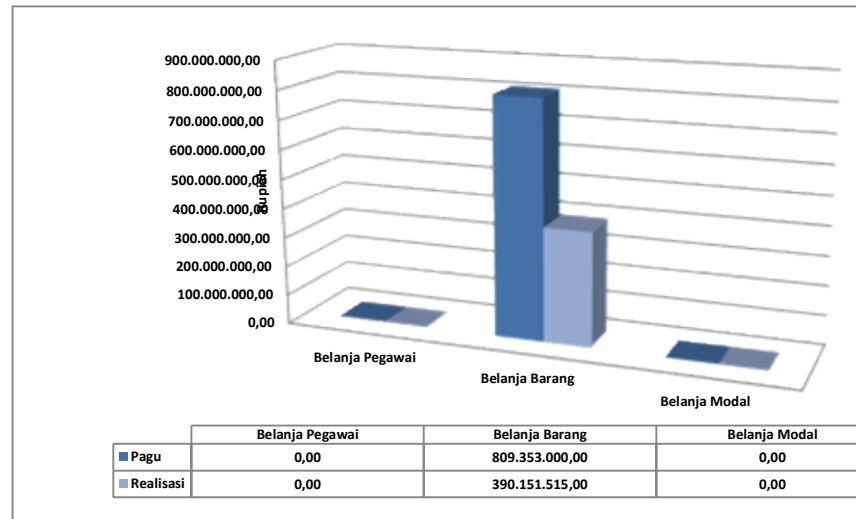
Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	809.353.000	390.151.515	48,21
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	809.353.000	390.151.515	48,21
Pengembalian Belanja	0	720.000	0,00
Total Belanja Netto	809.353.000	390.151.515	48,21

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya :

Tabel 7 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 183.320.515 atau sebesar 88,63 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena :

1. Pada tahun 2022 untuk semua Pengadilan Agama se Wilayah Yogyakarta mendapat tambahan anggaran belanja untuk layanan percepatan penyelesaian perkara.
2. Pada semester I 2022, koordinasi antar satker dibawah PTA Yogyakarta cukup baik sehingga target penggunaan anggaran dapat terpenuhi secara optimal.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	390.151.515	206.831.000	183.320.515	88,63
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	390.151.515	206.831.000	183.320.515	88,63

B.3. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
390.151.515*

Realisasi Belanja Barang pada lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 390.151.515 dan Rp. 206.831.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 183.320.515 atau 88,63 % dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan karena :

1. Pada tahun 2022 untuk semua Pengadilan Agama se Wilayah Yogyakarta mendapat tambahan anggaran belanja untuk layanan percepatan penyelesaian perkara.
2. Pada semester I 2022, koordinasi antar satker dibawah PTA Yogyakarta cukup baik sehingga target penggunaan anggaran dapat terpenuhi secara optimal.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	16.789.165	34.166.000	(17.376.835)	(50,86)
Belanja Barang Persediaan	9.435.000	0	9.435.000	0,00
Belanja Jasa	163.002.500	126.800.000	36.202.500	28,55
Belanja Perjalanan Dinas	200.924.850	45.880.000	155.044.850	337,94
Total Belanja Brutto	390.151.515	206.846.000	183.305.515	88,62
Pengembalian Belanja	0	15.000	(15.000)	0,00
Total Belanja Netto	390.151.515	206.831.000	183.320.515	88,63

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar:
Rp. 50.092.621 Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.092.621 dan Rp. 25.683.374.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada lingkup Pengadilan Agama wilayah Yogyakarta per 30 Juni 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 10 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	24.560.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	4.875.000	0
Persediaan	19.382.621	25.683.374
Persediaan Yang Belum Diregister	1.275.000	0
Total Aset Lancar	50.092.621	25.683.374

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran:
Rp. 24.560.000 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.560.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian Satker	Jenis	2022	2021
1.	PA Yogyakarta	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

2.	PA Sleman	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
3.	PA Wates	Kas di Bendahara Pengeluaran	900.000	0
4.	PA Bantul	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.660.000	0
5.	PA Wonosari	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.000.000	0
6.	PTA Yogyakarta	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah Total			24.560.000	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.560.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebesar masing-masing Rp 4.875.000 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 30 Juni 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	2022	2021
Uang Tunai	4.875.000	0
Rekening Bank (tidak mempunyai rekening di bank)	0	0
Jumlah	4.875.000	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 19.382.621*

Persediaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.382.621 dan Rp. 25.683.374. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021

No.	Uraian Satker	Jenis	2022	2021
1.	PA Yogyakarta	Persediaan	1.592.300	2.334.600
2.	PA Sleman	Persediaan	14.558.676	14.280.629
3.	PA Wates	Persediaan	0	2.723.700
4.	PA Bantul	Persediaan	907.900	1.815.800
5.	PA Wonosari	Persediaan	2.323.745	4.528.645
6.	PTA Yogyakarta	Persediaan	0	0
Jumlah Total			19.382.621	25.683.374

No.	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
1	Barang Konsumsi	19.382.621	25.683.374
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0

11	Persediaan lainnya	0	0
Total		19.382.621	25.683.374

C.1.4. Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp 1.275.000 dan Rp 0. Merupakan persediaan yang belum dicatat atau di detailkan.

Persediaan Yang Belum Diregister pada semester I 2022 ini lebih pada kesalahan teknis penginputan BAST, sehingga transaksi tercatat double.

Rincian Persediaan Yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Persediaan Belum Ditegister 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
PA Yogyakarta	1.275.000	0
Jumlah	1.275.000	0

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan
dan Mesin :
Rp. 0

Saldo perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :
Rp. 0*

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp. 0*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2022.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan :
Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 .

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat akumulasi Aset Tetap.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.2.8. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud Rp
0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.2.9 . Aset Lain-Lain

Aset Lain-
lain Rp 0

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

C.3. Kewajiban

Kewajiban :
Rp.
52.478.500

Nilai Kewajiban per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 52.478.500 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 30 Juni TA 2022 tercatat sebesar Rp. 52.478.500

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada lingkup Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Utang Kepada Pihak Ketiga	9.660.000	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	18.258.500	0
Uang Muka dari KPPN	24.560.000	0
Jumlah	52.478.500	0

C.3.1. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan

nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.3.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp.
24.560.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.560.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.3.3. Utang kepada Pihak ketiga

Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp
9.660.000

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp 9.660.000 dan Rp 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C.3.4. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp
18.258.500

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp 18.258.500 dan Rp 0

C.4. Ekuitas

Ekuitas
(Rp.
2.385.879)

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp. 2.385.879) dan Rp. 25.683.374. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.3.1. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp
0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2022 dan TA 2021 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
377.920.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 377.920.500 dan Rp. 399.690.800. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	27.140.000
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	124.900.000
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	225.880.500
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0
Total Pendapatan		377.920.500

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0.

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp. 15.735.753

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.735.753 dan Rp. 5.584.150. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	15.735.753	5.584.150	10.151.603	181,79
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0,00

Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0,00
Total Beban Persediaan	15.735.753	5.584.150	10.151.603	181,79

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 195.200.165

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 195.200.165 dan Rp. 160.951.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Barang dan Jasa	195.200.165	160.951.000	34.249.165	21,28
Total Beban Jasa	195.200.165	160.951.000	34.249.165	21,28

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp.0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 212.159.850

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 212.159.850 dan Rp. 45.880.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada

30 Juni 2022 dan 2021 disajikan pada halaman selanjutnya :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	212.159.850	45.880.000	166.279.850	362,42
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	212.159.850	45.880.000	166.279.850	362,42

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain : Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp. 25.683.374*

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.683.374 dan Rp. 23.864.131.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus LO (Rp
45.175.268)*

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp. 45.175.268) dan Rp. 187.275.650. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp 0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp
0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0.

E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.6. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0.*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.7. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
lain Rp 0.*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.8. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp
17.106.015*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.106.015 dan (Rp. 192.859.800). Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	373.045.500
Ditagihkan ke Entitas Lain	390.151.515
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	17.106.015

E.8.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022, DDEL sebesar Rp. 373.045.500 sedangkan DKEL sebesar Rp. 390.151.515.

E.8.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0.

E.8.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0.

E.9. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
(Rp. 2.385.879)*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp. 2.385.879) dan Rp. 18.279.984.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada tahun 2021 dan 2022.

F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua

Tidak ada informasi belanja akrual di tahun 2022.

F.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan oleh satker-satker di Wilayah Koordinator Wilayah Yogyakarta (04) adalah sebagaimana terlampir.

F.5. Revisi DIPA

Revisi DIPA disajikan terlampir dalam masing-masing CALK satker.

F.6. Ralat SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Tidak ada ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB di tahun 2022.

F.7. Pengungkapan Lain-lain

(A) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

I. Keuangan Biaya Perkara

Keadaan keuangan biaya perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ditampung di bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dengan nomor rekening 0245-01-002048-30-9 atas nama **RPL 030 PA YOGYAKARTA utk PDT**. Saldo per 30 Juni 2022 Rp. 8.416.891.216 dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya Perkara dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp.	127.994.900
b. Jumlah Pengeluaran	Rp.	<u>78.370.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.	49.624.900

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.	22.032.500
b. Simpan di Bank	Rp.	<u>8.924.128.500 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp.	8.946.161.000 (-)
Selisih	Rp.	8.896.536.100

Penjelasan Selisih :

1. Uang Titipan Biaya Eksekusi Rp. 25.814.950,-
2. Uang Titipan Konsinyasi Rp. 8.866.412.384,-
3. Selisih : Rp. 4.308.766,- (perkara e-court yang belum didaftar)

2. Biaya Konsinyasi dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp. 8.881.412.384
b. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 15.000.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp. 8.866.412.384

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp. 0
b. Simpan di Bank	<u>Rp. 8.866.412.384 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp. 8.866.412.384

3. Biaya Eksekusi dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp. 41.832.850
b. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 16.018.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp. 25.814.950

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp. 0
b. Simpan di Bank	<u>Rp. 25.814.950 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp. 25.814.950

II. Keuangan Biaya Proses

Saldo awal per 01 Januari 2022	Rp. 6.690.250
Penerimaan (Jan s.d. Juni 2022)	<u>Rp. 35.325.000 (+)</u>
Jumlah penerimaan	Rp. 42.015.250
Pengeluaran (Jan s.d. Juni 2022)	<u>Rp. 30.467.500 (-)</u>
Saldo per 30 Juni 2022	Rp. 11.547.750

(B) PENGADILAN AGAMA BANTUL

I. Keuangan Biaya Perkara

Pengadilan Agama Bantul mempunyai Rekening lainnya yang digunakan untuk menampung Uang Titipan Pihak ketiga/uang Panjar Perkara di **Bank BRI Cabang Bantul** dengan nomor rekening **0236-01-000611-30-1** atas nama **RPL 030 PA**

BANTUL UTK PDT. BIAYA PERKARA dengan saldo akhir per 30 Juni 2022 sebesar
Rp. 143.821.000,-

1. Biaya Perkara dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Saldo per 1 Jan 2022	Rp. 137.644.000
b. Jumlah Penerimaan	Rp. 896.395.000
c. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 871.312.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp. 162.727.000

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp. 25.226.000
b. Simpan di Bank	<u>Rp. 143.821.000 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp. 169.047.000
Selisih	Rp. 6.320.000

Penjelasan Selisih :

Selisih Rp. 6.320.000,- (perkara e-court yang belum didaftar)

2. Biaya Konsinyasi dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp. 0
b. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 0 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp. 0

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp. 0
b. Simpan di Bank	<u>Rp. 0 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp. 0

3. Biaya Eksekusi dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Saldo per 1 Jan 2022	Rp. 47.042.000
b. Jumlah Penerimaan	Rp. 14.200.000
c. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 36.925.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp. 24.317.000

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.	18.957.000
b. Simpan di Bank	<u>Rp.</u>	<u>5.360.000 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp.	24.317.000

II. Keuangan Biaya Proses

Saldo awal per 01 Januari 2022	Rp.	15.604.765
Penerimaan (Jan s.d. Juni 2022)	<u>Rp.</u>	<u>75.150.000 (+)</u>
Jumlah penerimaan	Rp.	90.754.765
Pengeluaran (Jan s.d. Juni 2022)	<u>Rp.</u>	<u>50.350.000 (-)</u>
Saldo per 30 Juni 2022	Rp.	40.404.765

(C) PENGADILAN AGAMA WONOSARI

I. KEUANGAN BIAJA PERKARA

Pengadilan Agama Wonosari mempunyai Rekening lainnya yang digunakan untuk menampung Uang Titipan Pihak ketiga/uang Panjar Perkara di **Bank BRI Cabang Wonosari** dengan nomor rekening **153-01-001577-30-2** atas nama **RPL 149 PDT PENGADILAN AGAMA WONOSARI**, dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar **Rp. 72.382.000**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Perkara dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a.Saldo per 31 Mei 2022	Rp.	101.687.000
b.Jumlah Penerimaan	Rp.	151.515.000
c.Jumlah Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>163.639.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.	89.563.000

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.	17.181.000
b. Simpan di Bank	<u>Rp.</u>	<u>78.382.000 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp.	89.563.000

2. Biaya Konsinyasi dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Buku :

a. Saldo per 31 Mei	Rp.	1.600.000
---------------------	-----	-----------

b. Jumlah Penerimaan	Rp. 1.500.000
c. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 0 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp. 3.100.000

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp. 3.100.000
b. Simpan di Bank	<u>Rp. 0 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp. 3.100.000

3. Biaya Eksekusi dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Saldo per 31 Mei	Rp. 9.145.000
b. Jumlah Penerimaan	Rp. 0
c. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 9.145.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp. 0

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp. 0
b. Simpan di Bank	<u>Rp. 0 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp. 0

(D) PENGADILAN AGAMA WATES

I. Keuangan Biaya Perkara

Pengadilan Agama Wates mempunyai Rekening lainnya yang digunakan untuk menampung Uang Titipan Pihak ketiga/uang Panjar Perkara di **Bank BRI Cabang Wates** dengan nomor rekening **0152-01-000920-30-4** atas nama **RPL 030 PA WATES UTK PDT BIAYA PERKARA**, dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar **Rp. 36.981.500,-**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Perkara dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Saldo 31 Des 2021	Rp. 42.906.500
b. Jumlah Penerimaan	Rp. 27.675.000
c. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 28.707.500 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp. 41.874.000

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp. 4.920.000
b. Simpan di Bank	<u>Rp. 36.981.500 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp. 41.874.000

II. Keuangan Biaya Proses

Saldo awal per 01 Januari 2022	Rp. 5.085.000
Penerimaan (Jan s.d. Juni 2022)	<u>Rp. 27.675.000 (+)</u>
Jumlah penerimaan	Rp. 32.760.000
Pengeluaran (Jan s.d. Juni 2022)	<u>Rp. 28.707.500 (-)</u>
Saldo per 30 Juni 2022	Rp. 4.052.500

(E) PENGADILAN AGAMA SLEMAN

I. Keuangan Biaya Perkara

Kedadaan keuangan biaya perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ditampung di bank **BPD BRI Cabang Sleman** dengan nomer rekening **0247-01-001534-30-5** atas nama **RPL 030 PDT PA SLEMAN**, saldo per 30 Juni 2022 **Rp. 278.241.000** dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Perkara dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp.
b. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.
b. Simpan di Bank	<u>Rp. (+)</u>
Jumlah Kas	Rp.

2. Biaya Konsinyasi dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp.	0,00
b. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.	0,00

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.	0,00
b. Simpan di Bank	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp.	0,00

3. Biaya Eksekusi dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp.	
b. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>(-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.	

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.	0
b. Simpan di Bank	<u>Rp.</u>	<u>(+)</u>
Jumlah Kas	Rp.	

II. Keuangan Biaya Proses

Saldo awal per 01 Januari 2022	Rp.	
Penerimaan (Jan s.d. Juni 2022)	<u>Rp.</u>	<u>(+)</u>
Jumlah penerimaan	Rp.	
Pengeluaran (Jan s.d. Juni 2022)	<u>Rp.</u>	<u>(-)</u>
Saldo per 30 Juni 2022	Rp.	

(F) PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. Keuangan Biaya Perkara

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempunyai Rekening lainnya yang digunakan untuk menampung Uang Titipan Pihak ketiga/Uang Panjar Perkara di **Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta** dengan nomor rekening **0245-01-000751-30-4** atas nama **RPL 030 PTA YOGYAKARTA UTK PDT**, saldo per 30 Juni 2022 sebesar **Rp. 325.000,-**.

Biaya Perkara dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Saldo per 1 Jan 2022	Rp.	0
b. Jumlah Penerimaan	Rp.	6.000.000
c. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>5.960.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.	40.000

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp. 40.000
b. Simpan di Bank	<u>Rp. 325.000 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp. 365.000

Selisih Rp. 325.000 adalah saldo rekening

DAFTAR LAMPIRAN